

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 118 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang sudah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memperoleh sampel akhir sebanyak 43 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proses pengambilan sampel bisa dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel IV.1**

#### **Proses pengambilan sampel jumlah Pemda**

KETERANGAN	Jumlah Pemda Kab/Kota
Jumlah Seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014	118
Pemda yang tidak menyampaikan LPPD 2014	(18)
Pemda dengan data tidak lengkap	(57)
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan data lengkap	43
Jumlah sampel akhir dalam penelitian	43

Sumber: Data sekunder dari LPPD, 2014

#### B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian yang dilihat dari jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

**Tabel IV.2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKPD	43	0,08000	2,71000	0,3637209	0,49891322
BM	43	0,00090	0,67251	0,1163107	0,13920148
IR	43	0,03008	0,70830	0,5411444	0,13479987
LEV	43	0,00001	0,02120	0,0043321	0,00565292
SZ	43	28,17798	30,53072	28,8819695	0,48971693
PAD	43	0,02421	15,79803	0,7474219	2,64283060

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Dari Tabel IV.2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yaitu 43 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Tabel diatas juga menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan dari masing-masing variabel akan diuraikan sebagai berikut:

Standar deviasi untu kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dikonversi, menunjukkan rata-rata sebesar 0,3637209 yang berarti secara rata-rata kinerja pemerintah daerah belum baik karena berada pada kriteria prestasi rendah. Pemerintah daerah yang memiliki KKPD tertinggi yaitu Kota Tangerang (Provinsi Banten) dengan nilai maksimum 2,71000, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki KKPD terendah yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Bantul dengan nilai minimum 0,08000. Sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nominal sebesar 0,49891322.

Variabel Belanja Modal, diukur dengan besarnya belanja modal dibandingkan dengan total realisasi belanja memiliki rata-rata sebesar 0,1163107 atau 11%. Hal ini menunjukkan masih kecilnya alokasi anggaran untuk belanja modal sehingga pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau jawa belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki nilai maksimum yaitu Kota Madiun (Provinsi Jawa Timur) dengan nilai maksimum 0,67251 sehingga memiliki porsi belanja modal terbesar. Sedangkan pemerintah daerah dengan belanja modal terkecil adalah Kabupaten Sleman (Provinsi DI Yogyakarta) dengan nilai minimum sebesar 0,00090. Sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nominal sebesar 0,13920148.

*Intergovernmental Revenue* Tingkat yang diukur dengan Dana Perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan memiliki nilai rata – rata sebesar 0,5411444 atau 54,11% hal ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan dalam total pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2014 masih besar. Hal ini juga menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi karena nilainya diatas 50%. Pemerintah daerah yang memiliki porsi Dana Perimbangan terbesar adalah Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) dengan nilai maksimum 0,70830. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki porsi Dana Perimbangan terkecil adalah Kota Tagal (Provinsi Jawa Tengah) dengan nilai minimum 0,03008.

*Leverage* diukur dengan perbandingan antara besarnya utang terhadap modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2014 memiliki rata-rata 0,0043321. Pemerintah daerah dengan *leverage* terbesar adalah Kabupaten Majalengka (Provinsi Jawa Barat) dengan nilai maksimum 0,02120. Sedangkan pemerintah daerah dengan *leverage* terkecil adalah Kabupaten Boyolali (Provinsi Jawa Tengah) dengan nilai minimum 0,00001. Sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nominal sebesar 0,00565292

Variabel *size* atau ukuran pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset dan diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural ( $\ln$ ), memiliki nilai rata-rata 28,8819695. Pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2014 yang memiliki ukuran pemerintah daerah dalam jumlah aset terbesar yaitu Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dengan nilai maksimum 30,53072, sedangkan daerah yang jumlah asetnya kecil yaitu Kabupaten Kulonprogo (Provinsi DI Yogyakarta) dengan nilai minimum 28,17798. Sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nominal sebesar 0,48971693.

Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan menggunakan rumus pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total penghasilan, menghasilkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki rata-rata sebesar 0,7474219. Pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2014 yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar yaitu Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah) dengan nilai maksimum 15,79803, sedangkan daerah

yang memiliki pendapatan asli daerah terkecil adalah Kabupaten Bantul (Provinsi DIY) dengan nilai minimum 0,02421. Sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nominal sebesar 2,64283060.

### C. Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

**Tabel IV.3**

#### Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov Z	Probability (p)	Kriteria	Simpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,692	0,725	$p > 0,05$	Data berdistribusi normal

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diketahui bahwa nilai signifikansi atau probabilitas yaitu 0,725 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan seluruh data terdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat

dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.

Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Simpulan
Belanja Modal (BM)	0,913	1.095	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Intergovernmental Revenue (IR)	0,762	1.312	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Leverage (LEV)	0,964	1.037	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Size (SZ)	0,781	1.280	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,911	1.097	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Dari hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih 95%, sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF kurang lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji *Glejser*. Apabila probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

**Tabel IV.5**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig.	Kriteria	Simpulan
Belanja Modal (BM)	0,525	$p > 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Intergovernmental Revenue (IR)	0,608	$p > 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Leverage (LEV)	0,362	$p > 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Size (SZ)	0,311	$p > 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,392	$p > 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## D. Pengujian Ketepatan Model

### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah keenam variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai  $F_{\text{hitung}}$  dan  $F_{\text{tabel}}$ . Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

**Tabel IV.6**

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

<b>F-hitung</b>	<b>Sign.</b>	<b>Simpulan</b>
7,676	0,000	Berpengaruh Simultan

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  $F_{\text{hitung}}$  memiliki nilai 7,676 lebih besar dari  $F_{\text{tabel}}$  yaitu 2,45 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.



## 2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R<sup>2</sup>.

**Tabel IV.7**

**Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,714	0,509	0,433

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Dari hasil uji R<sup>2</sup>, diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,433 atau 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan sebesar 43,3% oleh variabel independen yaitu belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, pendapatan asli daerah. Sedangkan 56,7% variasi kinerja pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.

## E. Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan menggunakan program SPSS *for Windows Release 20.0*. Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Regresi dan Uji Statistik t**

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sign.	Simpulan
Konstanta	-0,291	-0,073	0,942	
Belanja Modal (BM)	1,774	4,107	0,000	Berpengaruh Signifikan
Intergovernmental Revenue (IR)	-1,874	-3,837	0,000	Berpengaruh Signifikan
Leverage (LEV)	-8,522	-0,823	0,416	Tidak Berpengaruh
Size (SZ)	0,053	0,397	0,693	Tidak Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-0,032	-1,411	0,166	Tidak Berpengaruh
F-hitung = 7,676				
Adjusted R Square = 0,443				
*Signifikan pada $\alpha = 5\%$				

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

### 1. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel IV.8 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KKPD} = -0,291 + 1,774 \text{ BM} - 1,874 \text{ IR} - 8,522 \text{ LEV} + 0,053 \text{ SZ} - 0,032 \text{ PAD} + \varepsilon$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -0,291 menunjukkan bahwa variabel belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, pendapatan asli daerah jika nilainya 0 maka kinerja pemerintah daerah memiliki tingkat kinerja sebesar -0,291.

- b. Nilai koefisien BM ( $\beta_1$ ) sebesar 1,774 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan belanja daerah sebesar 1 kali maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 1,774 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- c. Nilai koefisien IR ( $\beta_2$ ) sebesar -1,874 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *intergovernmental revenue* sebesar 1 kali maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 1,874 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- d. Nilai koefisien LEV ( $\beta_3$ ) sebesar -8,522 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *leverage* sebesar 1 kali maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 8,522 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- e. Nilai koefisien SZ ( $\beta_4$ ) sebesar 0,053 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *size* sebesar 1 kali maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,053 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- f. Nilai koefisien PAD ( $\beta_5$ ) sebesar -0,032 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 kali maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,032 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

## 2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) untuk belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, pendapatan asli daerah. Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Kekuatan hubungan yang terjadi diantara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel belanja modal mempunyai nilai  $t_{\text{hitung}}$  4,107 lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  1,681 dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,016 < 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
- b. Variabel *Intergovernmental revenue* mempunyai nilai  $t_{\text{hitung}}$  - 3,837 lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  1,681 Dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental revenue*

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis diterima.

- c. Hipotesis ketiga dijelaskan dalam variabel *leverage* (LEV) yang mempunyai nilai  $t_{\text{hitung}} -0,823$  lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}} 1,681$  dan diperoleh nilai signifikansi  $0,416$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,416 > 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak.
- d. Hasil pengujian untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. *Size* mempunyai nilai  $t_{\text{hitung}} -0,397$  lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}} 1,681$  dan diperoleh nilai signifikansi  $0,698$  lebih bsar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,698 > 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.
- e. Variabel Pendapatan asli daerah mempunyai nilai  $t_{\text{hitung}} -1,411$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}} 1,641$  dan diperoleh nilai signifikansi  $0,166$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,166 > 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak.

## **F. Pembahasan**

### **1. Hubungan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Belanja Modal daerah dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan dengan realisasi belanja modal dan total realisasi belanja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama, belanja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar belanja modal, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah belanja modal yang tinggi, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Belanja modal disini juga mampu menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yaitu berpengaruh positif. Penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Simanullang (2013) dan Sudarsono yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Dan juga Utomo (2015) dan Mustikarini (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 2. Hubungan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*Intergovernmental revenue* yang diukur dengan dana perimbangan terhadap total pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Utomo (2015) menyatakan salah satu fenomena *flaypaper effects* menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang lebih bergantung pada Dana Perimbangan daripada PAD merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih efisien dan ekonomis, namun juga memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yaitu berpengaruh negatif, penelitian ini mendukung penelitian dari Simanullang (2013) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) dan Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

### **3. Hubungan *Leverage* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

*Leverage* diukur dengan kepemilikan utang terhadap modal yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Hasil uji regresi untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki dana yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dan arah koefisiennya konsisten yaitu berpengaruh negatif. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015), Kusumawardani (2012) dan Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Utomo (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **4. Hubungan *SIZE* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

*Size* atau ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural ( $\ln$ ) dari total aset. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis keempat, *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.



Hasil pengujian ini berarti tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya semakin besar ukuran daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda yang tinggi, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Mustikarini (2012) dan Kusumawardani (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

##### **5. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pendapatan asli daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kelima menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin rendah pendapatan asli daerah, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah

pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa masih terlalu kecil. PAD dianggap masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Sehingga PAD memiliki kontribusi yang kecil dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) dan Simanullang (2012) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.